**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR OLEH DINAS KEHUTANAN DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN MUARO BUNGO**

**Hendra hsm, Uning Pratimaratri , Nurbeti**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatt

E-mail : Hendrahsm08@gmail.com

**ABSTRAK**

Tindak pidana pembalakan liar telah diatur pada pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan, dan diberikan sanksi pidana terdapat dalam pasal 73 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5). Pembalakan liar menyebabkan kerusakan hutan semakin parah terutama terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan hidup sekitarnya. Maka pemerintah di kabupaten Muaro Bungo berupaya menanggulangi tindakan pembalakan liar tersebut untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, terutama di kabupaten Muaro Bungo. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh Dinas Kehutanan dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Muaro Bungo?, 2) Apakah kendala-kendala ditemui Dinas Kehutanan mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Muaro Bungo?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diambil dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan (1) pelaksanaan penyulahan terhadap masyarakat dan pengawasan terhadap kawasan hutan, (2) kendala-kendala yang ditemui dalam hal penanggulangan pembalakan liar adalah kurangnya dana, sarana dan prasarana, sanksi pidana masih sempit.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Pembalakan Liar**